

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA TERHADAP PENYUSUNAN APBDesa
TALAWAAN KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA
UTARA TAHUN 2017**

Fecky M. Pangemanan, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat maupun dari APBD harus diumumkan secara transparansi pada publik, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dan tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap APBDesa yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan melihat pengaruh dan hubungan kausal antara variabel bebas (independent variable) yaitu partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa dengan variabel terikat (dependent variable) yaitu APBDesa Talawaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, termasuk didalamnya koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi berganda serta uji t dan uji f.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBDesa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap kali terjadi perubahan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik maka akan mempengaruhi penyusunan APBDesa.

Kata kunci : *Partisipasi masyarakat, transparansi, dana desa dan APBDesa.*

ABSTRACT

The village fund is essentially used for the welfare of citizens, promoting infrastructure development, citizen economy and other types of empowerment. Village funds disbursed by the central government as well as from the APBD must be publicly announced in transparency, in order to avoid misappropriation of funds, public suspicion and village development to be conducive.

This research was conducted in Talawaan Village Talawaan Subdistrict of North Minahasa Regency and the purpose of this study was to analyze the influence of community participation and transparency in village fund management to APBDesa aimed to know the relationship between two variables or more. This study will look at the influence and causal relationship between independent variable (independent variable) that is community participation and transparency of village fund management with dependent variable (APBDesa Talawaan). The method of analysis used in this study is multiple linear regression, including the multiple correlation coefficient, multiple determination coefficient and t test and f test.

From the results of this study explains that public participation and public policy transparency have a significant effect on the preparation of APBDesa. Thus it can be seen that every time there is a change of public participation and public policy transparency it will affect the preparation of APBDesa.

Keywords: *Community participation, transparency, village funds and APBDesa.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat maupun dari APBD harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif.

Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat. Dana Desa merupakan berkah yang berpotensi menjadi bencana. Pasalnya, jika tidak dikelola dengan baik, dana berjumlah milyaran tersebut akan berubah menjadi bencana. Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa wajib digunakan untuk empat urusan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang yang terdiri dari 16 bab dan 122 pasal ini memberlakukan implikasi hukum bagi aktor-aktor pengelolanya.

Keterlibatan masyarakat merupakan pendekatan apresiatif dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat desa. Pengelolaan informasi akan memanfaatkan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Website desa sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan transparansi akan menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus hadir secara fisik ke kantor desa. Jika pelaksanaan tersebut berhasil diterapkan, maka kita masih punya harapan, bahwa pembangunan berdasarkan partisipasi demi mencapai cita-cita kesejahteraan bersama akan mampu diwujudkan. Keterbukaan pengelolaan Dana Desa akan menghindarkan pejabat publik dari berbagai upaya penyimpangan. Jadi, transparansi atau keterbukaan bukanlah ancaman, tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Maka dari itu sosialisasi itu sangat penting dilakukan dengan tatap muka dengan masyarakat dan pemerhati dari publik. Mendes juga berharap agar untuk membangun infrastruktur dan pembangunan desa harus dilakukan melalui padat karya dan tidak diperbolehkan melibatkan orang ketiga atau diproyekkan. Artinya tenaga pekerjanya melibatkan warga wilayah desa tersebut, bahkan bila perlu bahan bakunya juga dibeli dari warga setempat. “Untuk apa, agar roda perekonomian masyarakat di wilayah desa tersebut bisa berkembang. Karena tujuan dari adanya dana desa ini untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan seluruh desa di Indonesia”.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Prioritas penggunaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

Pada Penelitian sebelumnya tentang Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa Oleh Syahrul Samsi dan Kualitas Apbdes Terhadap Pengawasan Apbdes Menuju Tata Pemerintahan Desa Yang Akuntabel Oleh Supartini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam pengelolaan dana desa terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017*”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017?
2. Apakah Transparansi Kebijakan Publik dalam pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam pengelolaan dana desa secara simultan berpengaruh terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara parsial terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017?
2. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik dalam pengelolaan dana desa secara parsial terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017?
3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam pengelolaan dana desa secara simultan terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017

Manfaat Penelitian

a. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada masyarakat dan pemerintah Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam pengelolaan dana desa terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017

b. Akademis

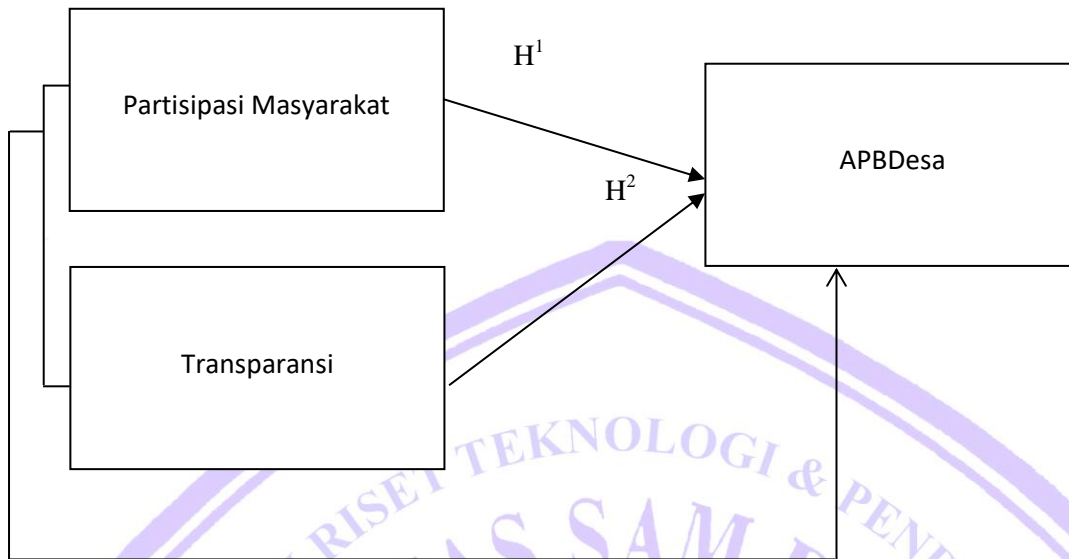
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah Pengelolaan Dana Desa terhadap Penyusunan APBDesa

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, Singkatnya, *pembangunan ekonomi adalah* suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapat masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendatang, *tujuan pembangunan ekonomi adalah* perbaikan kondisi diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Kerangka Konseptual



1. Diduga secara parsial Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap APBDes
2. Diduga secara parsial transparansi berpengaruh terhadap APBDes
3. Secara simultan

3 METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009:57). Penelitian ini akan melihat pengaruh dan hubungan kausal antara variabel bebas (*independent variable*) yaitu Partisipasi Masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu APBDes Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017. Desain penelitian dilaksanakan dengan survei dan bentuk pengujiannya dengan “*relationship causal studies*” atau penelitian yang menganalisis kausalitas atau sebab akibat antara Transparansi dan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap APBDes Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dan waktu penelitian tahun 2017.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Arsyad (2000:4) mengemukakan Data adalah keterangan mengenai sesuatu yang berguna untuk menganalisa suatu permasalahan dan selanjutnya mencari alternatif pemecahan. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian atau penjelasan serta tidak dapat diukur dalam angka-angka. Data kualitatif berupa sejarah Desa Talawaan

2. Data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numeric (angka). Data kuantitatif berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi dan realisasi dana desa

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan tujuan agar penelitian ini didukung dengan data yang akurat. **Indrianto & Supomo (2002 : 145)** menyatakan data penelitian dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer
Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data yang diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
Untuk melengkapi data, penulis melakukan penelitian kepustakaan yakni melalui buku-buku menyangkut masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*Field research*)
Yaitu penelitian dilakukan melalui :
 - Wawancara
Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pemerintah Desa Talawaan dan Masyarakat Desa Talawaan
 - Daftar Pertanyaan (Kuisisioner)
Daftar pertanyaan diberikan kepada sejumlah responden dalam hal ini Masyarakat Desa Talawaan

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, termasuk didalamnya koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi berganda serta uji t dan uji F. Berkaitan dengan hal tersebut maka data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20 (*Statistical Package for Social Sciences*).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2007:49). Uji validitas digunakan teknik uji validitas internal dengan korelasi *product moment* dari Pearson sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{((N\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2)((N\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2)}}$$

r_{xy} = koefisien korelasi

N = jumlah subyek/responden

X = skor butir

Y = skor jumlah

ΣX^2 = jumlah kuadrat nilai X

ΣY^2 = jumlah kuadrat nilai Y

(Arikunto, 1996:160)

Kemudian hasil r_{xy} hitung dikonsultasikan dengan harga kritis r_{tabel} t dengan taraf signifikansi 5%. Jika didapatkan r_{xy} hitung lebih besar dari r_{tabel} maka butir instrumen dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk (Ghozali, 2007:45). Suatu kuesioner, dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r = 0,3$. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. (Sugiyono, 2002: 124). Koefisien reliabilitas diperoleh dengan menggunakan rumus alpha cronbach. Bila Alpha cronbach $< 0,7$ maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data secara normal atau mendekati normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan menggunakan program SPSS, maka nilai hasil uji akan langsung ditampilkan tanpa harus menghitung secara manual.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan memiliki korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Cara yang digunakan untuk pengujian ada tidaknya multikolinearitas adalah melihat (Gujarati, 2003:362) :

- a. Nilai *Tolerance*
- b. *Variance Inflation Factors (VIF)*, nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$

c. Uji Autokorelasi

Gejala autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain. Untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Tabel 3.1
Pengukuran Autokorelasi

Durbin Watson	Kesimpulan
Kurang dari 1,10	Ada autokorelasi
1,10 sampai dengan 1,49	Tanpa kesimpulan
1,50 sampai dengan 2,46	Tidak ada autokorelasi
2,47 sampai dengan 2,90	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,90	Ada autokorelasi

Sumber : Algifari (2000:89)

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antar satu observasi ke observasi lain. Diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat dilakukan dengan *Spearman rank Correlation*, dimana data masing-masing variabel diubah menjadi bentuk jenjang, yaitu dari nilai terendah sampai nilai tertinggi kemudian mengkorelasikan antara variabel-variabel bebas dengan variabel gangguannya. Salah satu cara untuk mendiagnosis adanya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residualnya (*SRESID*). Adapun dasar analisis dengan melihat grafik plot adalah sebagai berikut:

- Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heterokedastisitas
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu suatu metode yang dipakai guna menggambarkan hubungan suatu variable dependen dengan dua atau lebih dari dua variabel independen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, mengikuti pendapat (Rangkuti, 2001 : 66-67) yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

- Y = APBDesa
- X₁ = Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa
- X₂ = Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa
- β₀ = Intercept Y
- β₁, β₂ = Koefisien Regresi
- e = Error atau sisa (residual)

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi berganda (R²) adalah estimasi proporsi variabel terikat APBDesa (Y), yang disumbangkan oleh variabel bebas, yaitu variabel Partisipasi Masyarakat (X₁) dan variabel Transparansi (X₂).

Bila R² = 1, berarti persentase sumbangan variabel X₁ dan X₂ terhadap naik turunnya variabel Y sebesar 100% dan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi variabel Y, sebaliknya jika R² = 0, berarti tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan terhadap variabel Y. Perhitungan koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel terikat (**Koncuo M, 2001:100**).

Uji Hipotesis Koefisien Regresi

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini, digunakan statistic uji F dan uji t.

Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F merupakan pengujian signifikan yang digunakan untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh variabel independen (bebas) yaitu Partisipasi Masyarakat (X₁) dan Transparansi (X₂) terhadap variabel dependen (terikat) yaitu APBDesa.

1. Perumusan Hipotesis Nihil (H₀) dan Hipotesis alternatif (H₁)

H₀ = β₁ = 0, Tidak ada pengaruh yang positif dari masing-masing variabel bebas (X₁, X₂) , terhadap variabel terikat Y.

H₁ ≠ β₁ = 0, Adanya pengaruh yang positif dari masing-masing variabel bebas (X₁, X₂), terhadap variabel terikat Y.

2. Kesimpulan yang diambil

Pengujian ini dengan taraf signifikansi 5% (0,05)

a. Jika probabilitas <0,05, maka H₀ ditolak, berarti masing-masing variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat.

b. Jika probabilitas >0,05, maka H₀ diterima, berarti masing-masing variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat.

Uji t

Pengujian uji t digunakan untuk menguji signifikan antara hubungan variabel X_1 , dan X_2 terhadap Y, apakah variabel X_1 dan X_2 berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Penyusunan hipotesis yang diuji, berupa hipotesis nol (H_0), dan hipotesis alternatif (H_1).

$H_0 = B_i = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial pada masing-masing variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y).

$H_1 = B_i \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada masing-masing variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y).

Tingkat kepercayaan yang digunakan atau taraf signifikan adalah 5% dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti masing-masing variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti masing-masing variabel bebas secara individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 2). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas (X_1 , X_2) serta satu variabel terikat (Y).

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Sebelum dilakukan analisis regresi maka terlebih dahulu akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Berikut akan disajikan hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas variabel Partisipasi Masyarakat yang terdiri dari 7 pertanyaan :

Tabel 4.1.
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X_1)

No	Pertanyaan	Corrected item - Total Correlation	Keterangan
1.	P1	0,808	Valid
2.	P2	0,730	Valid
3.	P3	0,578	Valid
4.	P4	0,814	Valid
5.	P5	0,752	Valid
6.	P6	0,676	Valid
7.	P7	0,780	Valid
Alpha Cronbach = 0,908			
$r_{tabel} = 0,361$			

Sumber: Hasil Olahan Data, 2018

Dari tabel 4.1 ternyata hasil uji validitas untuk variabel Partisipasi Masyarakat dengan tujuh butir item ternyata semuanya valid karena berada diatas nilai kritisnya $r_{tabel} = 0,361$ sehingga butir instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh Alpha Cronbach = 0,908 atau berada diatas nilai kritis yang disarankan sebesar 0,6 sehingga variabel Partisipasi Masyarakat dinyatakan reliabel.

Berikut hasil uji validitas variabel Transparansi yang terdiri dari 5 pertanyaan :

Tabel 4.2.
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Transparansi (X₂)

No	Pertanyaan	Corrected item Total Correlation	Keterangan
1.	P1	0,734	Valid
2.	P2	0,699	Valid
3.	P3	0,659	Valid
4.	P4	0,697	Valid
5.	P5	0,648	Valid
Alpha Cronbach = 0,864 r _{tabel} = 0,361			

Sumber: Hasil Olahan Data, 2018 (lampiran 3)

Dari tabel 4.2 ternyata hasil uji validitas untuk variabel Transparansi dengan lima butir pertanyaan ternyata semuanya valid karena berada diatas nilai kritisnya $r_{tabel} = 0,361$ sehingga butir instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh Alpha Cronbach = 0,864 atau berada diatas nilai kritis yang disarankan sebesar 0,6 sehingga variabel Transparansi Kebijakan Publik dinyatakan reliable. Selanjutnya dapat dilihat uji validitas variabel Penyusunan APBDesa yang terdiri dari 6 pertanyaan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Uji Validitas Variabel Penyusunan APBDesa (Y)

No	Pertanyaan	Corrected item Total Correlation	Keterangan
1.	P1	0,813	Valid
2.	P2	0,772	Valid
3.	P3	0,733	Valid
4.	P4	0,770	Valid
5.	P5	0,715	Valid
6.	P6	0,730	Valid
Alpha Cronbach = 0,910 r _{tabel} = 0,361			

Sumber: Hasil Olahan Data, 2018 (lampiran 3)

Dari tabel 4.4 ternyata hasil uji validitas untuk variabel Penyusunan APBDESA dengan enam butir pertanyaan ternyata semuanya valid karena berada diatas nilai kritisnya $r_{tabel} = 0,361$ sehingga butir instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh Alpha Cronbach = 0,910 atau berada diatas nilai kritis yang disarankan sebesar 0,6 sehingga variabel Penyusunan APBDesa dinyatakan reliable

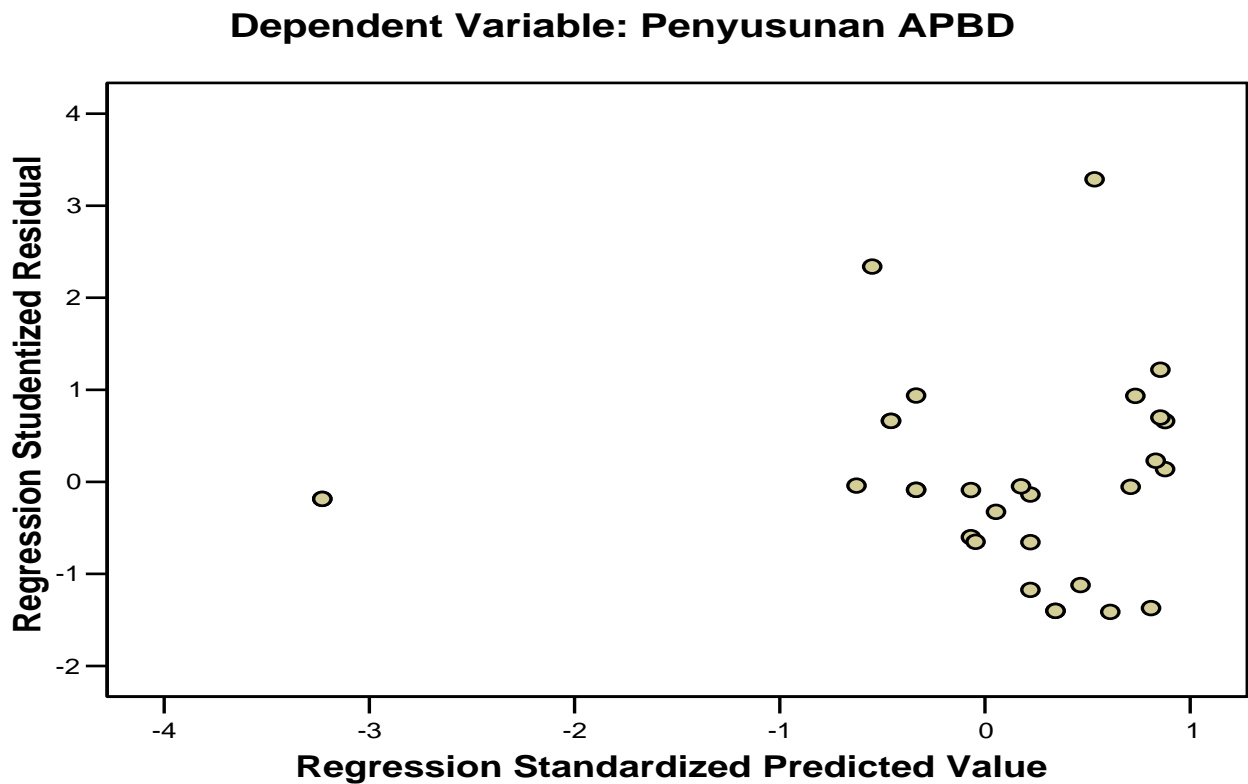
Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil regresi linier yang baik maka digunakan uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot*. Jika grafik *Scatter Plot* tidak membentuk atau menggambarkan pola tertentu, berarti dapat dikatakan model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *Program SPSS* seperti yang ada pada Lampiran, maka *Grafik Scatterplot* dapat dilihat dalam Gambar 4.1.

Gambar 4.1.
Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot



Sumber : *Output Pengolahan Data SPSS, 2018(lampiran4)*

Dari Gambar 4.1 di atas nampak bahwa diagram pencar residual tidak membentuk suatu pola tertentu atau posisinya dalam keadaan menyebar. Kesimpulannya, model regresi terbebas dari kasus heteroskedastisitas dan memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang heteroskedastisitas.

b. Uji Multikolinearitas

Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menganalisis Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10. Apabila nilai VIF variabel bebas < 10 , berarti tidak ada multikolinearitas. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *program SPSS* seperti yang ada pada Lampiran 4, untuk pengujian asumsi klasik multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.406	2.240		.181	.857		
	Partisipasi Masyarakat	.460	.145	.478	3.167	.004	.336	2.978
	Transparansi Kebijakan Publik	.546	.180	.457	3.025	.005	.336	2.978

a. Dependent Variable: Penyusunan APBD

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2018(lampiran 4)

Dari Tabel 4.4 nilai VIF untuk X_1 (Partisipasi Masyarakat) menunjukkan angka sebesar 2,978 ; dan X_2 (Transparansi Kebijakan Publik) sebesar 2,978 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi karena semua nilai VIF yang dihasilkan oleh Variabel X_1 dan $X_2 < 10$.

c. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Untuk memeriksa adanya autokorelasi, biasanya memakai uji *Durbin Watson (DW)* dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

- Jika $DW < 1,21$ atau $DW > 2,79$ maka terjadi autokorelasi.
- Jika $1,65 < DW < 2,35$ maka tidak terjadi autokorelasi.
- Jika $2,35 < DW < 2,79$ maka autokorelasi tidak dapat disimpulkan.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *Program SPSS* seperti yang ada pada Lampiran untuk pengujian asumsi klasik autokorelasi dapat dilihat dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5.Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.891 ^a	.793	.778	1.99004	1.090

a. Predictors: (Constant), Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Penyusunan APBD

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2018(lampiran 4)

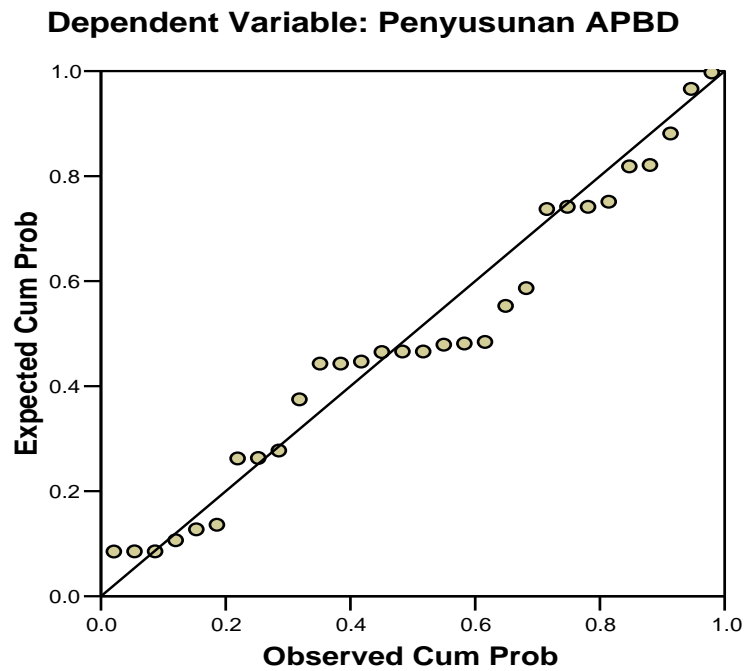
Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson (DW)* sebesar 1,090 atau menunjukkan bahwa nilai $DW < 1,21$ atau $DW > 2,79$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

d. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji asumsi normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang

baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka memenuhi persyaratan asumsi normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *Program SPSS* seperti yang ada pada Lampiran, maka Grafik Normalitas dapat dilihat dalam Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Uji Normalitas
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2018(lampiran 4)

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas.

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan bantuan *program SPSS*, maka hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6. Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.406	2.240		.181	.857		
	Partisipasi Masyarakat	.460	.145	.478	3.167	.004	.336	2.978
	Transparansi Kebijakan Publik	.546	.180	.457	3.025	.005	.336	2.978

a. Dependent Variable: Penyusunan APBD

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2018(lampiran 5)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *program SPSS* seperti pada tabel di atas maka dapat dilihat pada bagian “*Coefficient*” bahwa model regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

$$Y = 0,406 + 0,460 X_1 + 0,546 X_2 + e$$

Konstanta (α) sebesar 0,406 memberikan pengertian bahwa jika Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sama dengan nol (0), maka besarnya Penyusunan APBDesa adalah sebesar 0,406 satuan.

Jika nilai β_1 yang merupakan koefisien korelasi dari variabel Partisipasi Masyarakat (X_1) sebesar 0,460 mempunyai arti bahwa jika variabel Partisipasi Masyarakat bertambah 1 satuan, maka variabel Penyusunan APBDesa juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,460 satuan.

Jika nilai β_2 yang merupakan koefisien korelasi dari variabel Transparansi Kebijakan Publik (X_2) sebesar 0,546 mempunyai arti bahwa jika variabel Transparansi Kebijakan Publik bertambah 1 satuan, maka variabel Penyusunan APBDesa juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,546 satuan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap kali terjadi perubahan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik maka akan mempengaruhi Penyusunan APBDesa.

Koefisien Korelasi (R)

Analisis koefisien korelasi (R) ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dalam hal ini mengukur kuat lemahnya hubungan Partisipasi Masyarakat(X_1), dan Transparansi Kebijakan Publik (X_2) dengan Penyusunan APBDesa (Y).

Tabel 4.7. Koefisien Korelasi
Correlations

		Penyusunan APBD	Partisipasi Masyarakat	Transparansi Kebijakan Publik
Pearson Correlation	Penyusunan APBD	1.000	.850	.846
	Partisipasi Masyarakat	.850	1.000	.815
	Transparansi Kebijakan Publik	.846	.815	1.000
Sig. (1-tailed)	Penyusunan APBD	.	.000	.000
	Partisipasi Masyarakat	.000	.	.000
	Transparansi Kebijakan Publik	.000	.000	.
N	Penyusunan APBD	30	30	30
	Partisipasi Masyarakat	30	30	30
	Transparansi Kebijakan Publik	30	30	30

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2018(lampiran 6)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *program SPSS* seperti yang ada pada tabel bagian *Correlations* dapat dilihat bahwa koefisien korelasi linear yang dihasilkan antara Partisipasi Masyarakat(X_1) dengan Penyusunan APBDesa (Y) adalah sebesar 0,850 artinya tidak memiliki tingkat hubungan yang berlawanan atau negatif yaitu sebesar 0,850 dan koefisien korelasi linear yang dihasilkan antara Transparansi Kebijakan Publik (X_2) dengan Penyusunan APBDesa (Y) adalah sebesar 0,846 artinya juga tidak memiliki tingkat hubungan berlawanan atau negatif sebesar 0,846.

Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik memiliki hubungan yang sangat kuat sekali terhadap Penyusunan APBDesa.

Koefisien Determinan (R²)

Koefisien determinasi (R²) diperlukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat (X_1) dan transparansi kebijakan publik (X_2) terhadap Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Y), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8. Koefisien Determinan Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.891 ^a	.793	.778	1.99004	1.090

a. Predictors: (Constant), Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Penyusunan APBD

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2018(lampiran 6)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *program SPSS* seperti nampak pada tabel 4,9, maka dapat diketahui nilai R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,793 atau 79,3% dan nilai Adjusted R Square 0,778 atau 77,8%. Nilai R Square memberikan pengertian bahwa besarnya Penyusunan APBDESA dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik adalah sebesar 79,3 % sementara sisanya 20,7 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Pengujian Hipotesis

Perumusan hipotesis yang diuji, telah dikemukakan dalam Bab sebelumnya dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5 % atau $\alpha = 0,05$ maka hasil pengujian hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Uji F

Dengan menggunakan bantuan *program SPSS version 13.0* maka hasil F_{hitung} dapat dilihat dalam tabel 4.10

Tabel 4.9. Uji F ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	410.440	2	205.220	51.820	.000 ^a
	Residual	106.927	27	3.960		
	Total	517.367	29			

a. Predictors: (Constant), Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Penyusunan APBD

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2018(lampiran 7)

Dari Tabel 4.9. dapat diketahui hasil $F_{hitung} = 51,820 > F_{tabel} = 2,78$ (lampiran 8) dengan tingkat signifikan $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. yang berarti bahwa Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh terhadap Penyusunan APBDesa.

Dengan demikian hasil uji F menyatakan bahwa H_0 ditolak berarti H_a diterima, artinya partisipasi masyarakat (X_1) dan transparansi kebijakan publik (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Y).

b. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang sudah dihasilkan. Maka digunakan uji t untuk menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10. Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.406	2.240		.181	.857
	Partisipasi Masyarakat	.460	.145	.478	3.167	.004
	Transparansi Kebijakan Publik	.546	.180	.457	3.025	.005

a. Dependent Variable: Penyusunan APBD

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS, 2018 (lampiran 7)

Analisis ini menguji apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Penyusunan APBDesa. Dari hasil uji t pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Partisipasi Masyarakat (X_1) $t_{hitung} = 3,167 \geq t_{tabel} = 2,042$ (lampiran 8), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Atau dapat juga dilihat pada taraf signifikan t untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar $p\text{-value} = 0,004 < 0,05$, ini menunjukkan bahwa H_0 dan H_a diterima artinya variabel partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selanjutnya untuk uji t pada variabel transparansi kebijakan publik (X_2) $t_{hitung} = 3,025 > t_{tabel} = 2,042$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Atau dapat juga dilihat pada taraf signifikan t untuk variabel transparansi kebijakan publik sebesar $p\text{-value} = 0,005 < 0,05$, menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel transparansi kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya Supartini dalam penelitiannya “Kualitas APBDes Terhadap Pengawasan APBDes Menuju Tata Pemerintahan Desa Yang Akuntabel” bahwa Evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan pengetahuan tentang APBDes oleh BPD berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBDes. Kejelasan APBDes berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBDes. Kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan pengetahuan tentang APBDes oleh BPD secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBDes. Pengawasan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. Juga penelitian dari Muhammad Eko Atmajoyo “Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi. Kedua, Desa Bangunjiwo menyediakan pelatihan khusus untuk kegiatan masyarakat dalam rangka mendorong tumbuhnya potensi ekonomi. Terakhir, potensi ekonomi utama Desa Bangunjiwo disebut “Kajigelem”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap kali terjadi perubahan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik maka akan mempengaruhi Penyusunan APBDesa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat baik dalam bentuk partisipasi uang maupun buah pikiran ataupun masukan juga. Semakin terbukanya akses dari masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penggunaan dana desa berpengaruh signifikan dalam penyusunan APBDesa.

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat menghasilkan kesimpulan yang hampir sama dengan hasil penelitian bahwa transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berupa laporan keuangan yang di pajang dalam bentuk baliho di beberapa tempat membuat masyarakat lebih percaya dan mendukung hasil penyusunan APBDesa.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji F menunjukkan variabel Partisipasi Masyarakat(X_1) dan Transparansi Kebijakan Publik (X_2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penyusunan APBDesa (Y). Dengan nilai F_{hitung} sebesar sebesar 51,820 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 2,78 pada $\alpha = 0,05$.
2. Hasil uji t menunjukkan Partisipasi Masyarakat(X_1) dan Transparansi Kebijakan Publik (X_2) berpengaruh terhadap variabel Penyusunan APBDesa. Dengan hasil analisis variabel Partisipasi Masyarakat(X_1) $t_{hitung} = 3,167 > t_{tabel} = 2,042$ dan signifikansi p-value = 0,004 < 0,05 dan variable Transparansi Kebijakan Publik (X_2) $t_{hitung} = 3,025 > t_{tabel} = 2,042$ dan signifikansi p-value = 0,005 < 0,05.
3. Hasil koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat dan variabel Transparansi Kebijakan Publik memberikan pengaruh terhadap Penyusunan APBDesa. Dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,891.

Saran

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang telah ada senantiasa dipertahankan dan senantiasa diupayakan untuk terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan peraturan-peraturan daerah serta pembuatan fasilitas-fasilitas pendukung bagi masyarakat Kota Talawaan
2. Tingkat transparansi kebijakan publik yang sudah ada senantiasa dikembangkan menuju kearah yang lebih baik dan lebih transparan. Karena transparansi merupakan salah satu semangat dari *Good Governance*.
3. Bagi masyarakat harus meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah serta harus berani meminta pertanggungjawaban atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah disusun, supaya pemerintah tidak menghambur-hamburkan uang rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, dkk, 2002, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Anthony, Govindarajan, 2003, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.
- Eddi Wibowo, Tomo HS, dan Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Memahami Good Governance dan Good Corporate Governance*, YPPAI, Yogyakarta, 2004.
- Jagat (2006), *Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Kuncoro, M. (2001), *Metode Riset Untuk Bisnis dan APBDesa*. Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, M. (2003), *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan APBDesa*. UPP. AMP YPKN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Monique Sumampouw, 2004:106-107 Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)*
- Revisoynd Baswir, *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Tiga BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Roseptalia, Rima, 2006, *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*, Fakultas APBDesa Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Zainuddin et al., 2002, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.